

ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS PEKERJAAN WAJIB PAJAK TERHADAP MOTIVASI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK

Amilin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Fanny Yusronillah

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRACT

The purpose of this research is to figure out the influence between education level and tax payers variety of jobs toward the motivation in fulfilling tax obligatory. The sample in this research includes 80 correspondences from 8 (eight) sub district of Jatinegara. Each sub district represents 10 correspondences. The sampling method is Area Sampling (cluster sampling). The collected of data to use primary data with questionnaire technique.

Quality of test in this research are validity of test to use is Pearson correlation and reliability test of the research to use is cronbach alpha and then hypothesis test to use is Univariate analysis of variance (two way ANOVA). The results in this research are: (a). Educational level does not have any influences toward the motivation in fulfilling tax obligatory. (b). the variety of jobs it self does not have any influences towards the motivation in fulfilling tax obligatory. (c). the interaction between educational level and variety of jobs does not have any influences towards motivation in fulfilling tax obligatory.

Keyword : *Education level, variety of jobs, motivation to fulfilling tax obligatory.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak/DJP) terbilang sering melakukan reformasi perpajakan. Mulai dari mereformasi Undang-undang (UU) perpajakan sampai dengan aturan pelaksanaannya juga upaya-upaya menutup berbagai celah rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang memang diyakini ada dalam UU dan aturan main tersebut. Memodernisasi sistem administrasi perpajakan yakni administrasi yang dilakukan dengan teknologi informasi (TI) serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak (Anwar, 2005).

Ini pun dalam pelaksanaannya terbukti telah mengurangi persentuhan antar wajib pajak dan fiskus (aparatus pajak) yang selama ini rawan menimbulkan penyuapan, tawar-menawar pajak atau bahkan gertakan oleh pihak pajak dan lain-lain. Sementara bagi pajak sendiri sistem ini jelas merupakan salah satu bentuk monitoring yang akan sangat efektif untuk mengetahui seberapa besar kontribusi wajib pajak terhadap pajak. Disamping ada perubahan radikal pada struktur, sistem ini sebenarnya berusaha memberdayakan lagi *spirit* pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak (Winardi, 2006).

Amandemen UU perpajakan itu penting sebagai upaya menampung perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat seperti kemajuan teknologi. Ditjen pajak menampungnya dengan dibukanya pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) dan pembayaran pajak secara *on-line* (*e-Reg*, *e-SPT* dan *e-Filling*), dan juga membenahi hal-hal yang dianggap kurang *fair* baik bagi aparat pajak maupun wajib pajak (*tax payer*). Dalam perubahan UU tersebut juga diberikan penegasan kapan seseorang atau suatu badan harus mulai melaksanakan kewajiban perpajakannya. Demikian pula wewenang penyidik, kini semua instansi atau pihak lain diwajibkan memberikan data perpajakan pada Ditjen Pajak.

Peningkatan penerimaan pajak tidak saja sebuah keuntungan besar bagi daerah dalam rangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) namun bahkan negara dalam rangka pembangunan nasional (APBN) karena nanti Indonesia akan benar-benar mandiri dan bebas dari adanya utang luar negeri. Tidak berlebihan kiranya jika penulis sependapat dengan ungkapan *No body like to pay tax* meskipun harus diakui terdapat juga wajib pajak yang selama ini patuh dan taat terhadap semua kewajiban perpajakannya. Sebagai buktinya Ditjen Pajak setiap tahun selalu dapat meningkatkan penerimaan pajak baik melalui *intensifikasi* dan *ekstensifikasi*. Menurut Mustofa dalam Berita Pajak (2004), tersembunyiinya potensi tersebut tentunya bisa disebabkan karena berbagai hal antara lain:

1. Karena ketidaktahuan masyarakat akan kewajiban perpajakannya sehingga yang seharusnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi tidak terjaring.
2. Bagi yang sudah memiliki NPWP tetapi tidak mengerti akan kewajiban perpajakannya sehingga tidak semua kewajiban perpajakannya dilaksanakan.

3. Bagi yang sudah memiliki NPWP dan sudah mengerti akan kewajiban perpajakannya tetapi tidak mengungkapkannya secara jujur dalam SPT pajaknya.

Pembinaan wajib pajak dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan berbagai upaya antara lain dengan cara memberikan penyuluhan mengenai perpajakan baik melalui media elektronik, cetak maupun penerangan langsung di masyarakat. Usaha pembinaan dapat pula melalui jalur pendidikan (melalui bidang studi perpajakan) sebagai langkah awal dalam sosialisasi perpajakan. Peranan pendidikan dalam hal ini sebagai media dalam merubah mental masyarakat kearah yang lebih positif, mengarahkan adat gotong-royong pada posisi yang lebih luas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pendidikan perpajakan harus mulai ditanamkan sejak dini khususnya di lingkungan sekolah. Temuan Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI, 2004) mengatakan bahwa mutu manusia indonesia tergolong rendah. LPMI mendesak pemerintah dan masyarakat memberikan prioritas investasi lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia, terutama lewat pendidikan dan kesehatan (Tambunan, 2004).

Pembahasan yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi dan pengembangan pajak cukup berhasil dengan bukti bahwa adanya peningkatan penerimaan pajak setiap tahun. Adapun pengetahuan yang rendah tentang pajak karena ada faktor penghambat yang sangat dominan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak khususnya Pajak Penghasilan, sehingga dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak penghasilan sangat rendah. Oleh karena itu, peranan pendidikan dalam hal ini sebagai alat pentransfer pengetahuan perpajakan sangatlah penting. Lebih dari itu pendidikan mampu merubah mental masyarakat. Pendidikan merupakan indikator yang dominan di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu negara di dalam mewujudkan tujuan nasionalnya (Hutagaol, 2005).

Begitu banyak jenis pekerjaan yang ada didunia ini, dan akan makin bertambah banyak lagi seiring dengan perkembangan zaman. Beberapa jenis pekerjaan/jenis usaha yang ada sekarang misalnya: dilihat dari segi produk yaitu, usaha produksi dan usaha jasa. Dari segi skala usaha yaitu: perusahaan kecil, menengah dan besar. Lalu dari sudut pembagian sektor usaha ada sektor riil yang memproduksi barang-barang melalui pabrik-pabriknya dan ada juga sektor finansial seperti: perbankan, serta badan usaha keuangan lainnya. Sifat usaha harus sesuai dengan semangat kewiraswastaan yaitu harus saling menguntungkan untuk semua pihak yang terlibat (Hakim, 1998:21).

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak?

2. Apakah jenis pekerjaan wajib pajak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak?
3. Apakah interaksi antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak?

Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya menyangkut pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak. asumsi dalam penelitian ini adalah semua orang yang bekerja mendapatkan penghasilan dan penghasilan mereka dipotong pajak sehingga bisa disebut wajib pajak. Kriteria pendidikan hanya difokuskan pada pendidikan formal saja.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Pendidikan di Indonesia

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia, yang dilakukan secara sistematis, programatis dan berjenjang, agar dapat dihasilkan manusia-manusia yang berkualitas, yang akan dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya (Hasan, 2005:136).

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan peserta didik. Pendidikan berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Pendidikan adalah proses belajar dan mengajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat Tingkat pendidikan adalah pendidikan formal yang dilakukan seseorang secara berjenjang dan berkesinambungan dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi (Nasution, 1999:10-11).

Penghasilan dari pekerjaan seseorang merupakan obyek potensial bagi perpajakan di Indonesia. Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai swasta, wirausaha serta profesi. Penghasilan yang mereka peroleh merupakan obyek pajak penghasilan dan harus dipotong oleh pemerintah. Menurut Resmi (2003) pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

UU no 9/1999 tersebut ditetapkan bahwa Usaha Kecil (UK) adalah suatu unit usaha yang memiliki nilai aset neto (tidak termasuk tanah dan bangunan) yang tidak melebihi 200 juta rupiah atau penjualan per tahun tidak lebih besar dari 1miliar rupiah. Sedangkan menurut Inpres no. 10/1999 tersebut Usaha Menengah (UM) adalah suatu unit usaha dengan nilai aset neto (di luar tanah dan gedung) antara Rp. 200 juta hingga Rp. 10 miliar diatas itu adalah Usaha Besar (UB) (Tambunan, 2002:49).

Biro Pusat statistik (BPS) mendefinisikan skala usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja (*Labour*, L). UK adalah adalah perusahaan (baik yang berbadan hukum atau tidak) yang mempunyai L antara 5-19 orang termasuk pemilik usaha atau pengusaha, sedangkan usaha mikro (UMI) adalah usaha dengan L antara 1-4 orang. Sedangkan UM perusahaan yang mempekerjakan antara 20-99 orang, dan perusahaan dengan jumlah L lebih dari 99 orang dikategorikan sebagai UB (Tambunan, 2003: 307-308).

Problem inti motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana cara merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi di suatu negara.

Ditjen Pajak dapat memotivasi para wajib pajak dengan memahami kebutuhan-kebutuhan sosial mereka akan pengadaan *public goods and service* dan membuat mereka merasa senang dan penting bagi pelaksanaan pembangunan. Dari berbagai pendapat yang dikemukakan sebelumnya mengenai motivasi, pada prinsipnya semua memiliki pandangan yang sama yaitu motivasi adalah merupakan dorongan dari dalam manusia yang menjadi pangsak seseorang untuk melakukan tindakan. Menurut Syah (1997:136), motivasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

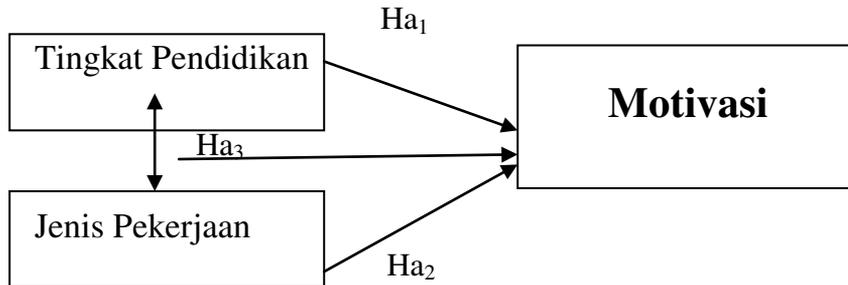
1. Motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar.
2. Motivasi ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya rangsangan dari luar.

Motivasi ekstrinsik ini tidak mudah timbul, maka para aparat pajak sangat berperan menumbuhkan motivasi wajib pajak agar proses penerimaan negara berjalan dan berhasil dengan baik. Antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu saling memperkuat, bahkan motivasi ekstrinsik itu dapat membangkitkan motivasi intrinsik. Hubungan peran aparat pajak dengan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak yaitu aparat pajak (fiskus) yang dipercaya untuk mengelola penerimaan negara harus mampu meyakinkan kepada wajib pajak akan manfaat pajak dalam suatu negara. Motivasi timbul dari dalam diri seseorang yang kemudian terealisasi berupa usaha atau kegiatan untuk mencapai tujuan.

Keberhasilan pembangunan berkaitan erat dengan jumlah penghasilan negara diantaranya PPh apalagi wajib pajak orang pribadi yang sekarang sedang digalakkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Karena penerimaan dana dari wajib pajak orang pribadi masih sangat kecil dari 200 juta lebih penduduk Indonesia hanya 10 juta warga Indonesia yang memiliki NPWP dan sudah termasuk wajib pajak badan usaha (Indonesian Tax Review, 2005:1).

Kerangka Berfikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut:

Gambar 1
Model Penelitian



2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurwati (1995) yaitu menganalisa hubungan latar belakang pendidikan wajib pajak dengan motivasi memenuhi kewajiban perpajakan di Kecamatan Matraman. Penelitian ini ingin menguji pengaruh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak di Kecamatan Jatinegara.

2.3 Perumusan Hipotesa

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka berfikir maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- Ha1: Tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak.
- Ha2: Jenis pekerjaan wajib pajak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak.
- Ha3: Interaksi antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini penulis memilih Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur sebagai tempat penelitian/melakukan riset. Populasi dalam penelitian ini adalah semua warga Kecamatan Jatinegara yang berada di Kecamatan tersebut. Sampel penelitiannya adalah seluruh warga kecamatan Jatinegara. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *area sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Kecamatan jatinegara mempunyai 8 kelurahan sehingga sampel daerah yang diambil adalah 80 sampel responden dengan perincian masing-masing kelurahan ditetapkan sampel sebanyak 10 responden.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independent dan variabel dependen.

3.2.1 Variabel Independen

1. Variabel tingkat pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Variabel pendidikan menggunakan skala nominal. Penelitian dibatasi hanya pada pendidikan formal wajib pajak yaitu terdiri dari: 1. SD 2. SLTP 3. SMU 4. D3 5. S1

2. Variabel jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan wajib pajak dalam penelitian ini terdiri dari: 1. Pegawai Negri 2. Pegawai swasta 3. Profesi 4. Wirausaha. Jenis pekerjaan wajib pajak diukur dengan menggunakan skala nominal.

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah motivasi. Motivasi adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif. Hal ini tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang tersebut. Motivasi diukur dengan menggunakan instrumen kuesioner oleh penelitian sebelumnya (Nurwati, 1995) yang telah dimodifikasi oleh penulis. Motivasi diukur dengan menggunakan skala interval.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang dibuat oleh Siti Nurwati (1995) dan telah dimodifikasi oleh penulis. Bobot penilaian atau angka hasil kuesioner dalam penelitian ini sesuai dengan yang digambarkan dalam skala *Likert* dengan standar penilaian terendah 1 dan tertinggi 5 dengan tipe jawaban Sangat Setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Kuesioner yang dibuat oleh peneliti sebelumnya (Nurwati, 1995) yaitu sebanyak 30 butir. Sedangkan pada penelitian ini penulis memakai 23 butir pertanyaan sebagai alat pengukur motivasi. Item atau butir pertanyaan yang sudah dimodifikasi penulis yaitu butir pertanyaan 3, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23.

3.4 Analisis Kualitas Data

3.4.1 Uji Validitas instrumen

Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya (Ghozali, 2005).

3.4.2 Uji Reliabilitas instrumen

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Jika hasil dari *Cronbach Alpha* diatas 0,60 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2005). Perhitungan reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* dengan bantuan SPSS 13.0.

3.5 Metode Analisis Data

Teknik analisis statistik yang digunakan adalah *two way ANOVA (Univariate Analysis of Variance)*. ANOVA merupakan metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen (metrik) dengan satu atau lebih variabel independen (non metrik atau kategorial). Pada kasus satu variabel dependen metrik dan dua atau lebih variabel independen kategorial sering disebut TWO WAY ANOVA. *Analysis of Variance* digunakan untuk mengetahui pengaruh utama (*main effect*) dan pengaruh interaksi (*interaction*) dari variabel independen kategorial (sering disebut faktor) terhadap variabel dependen metrik. Pengaruh utama (*main effect*) adalah pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan pengaruh interaksi adalah pengaruh bersama atau *joint effect* dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Hipotesis diterima apabila nilai signifikansinya dibawah 5%.

IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

4.1 Profil Responden

Hasil penelitian terhadap 80 responden di Kecamatan Jatinegara yang terbagi dalam 8 kelurahan yaitu: kelurahan Kampung Melayu, Balimester, Bidaracina, Cipinang Cempedak, Rawa Bunga, Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan dan Cipinang Muara, sehingga setiap kelurahan mewakili 10 responden. Karakteristik responden disajikan dalam tabel 4.1. berikut ini:

Tabel 1
Data Statistik Responden

		jumlah	Persentase
Jenis kelamin	Pria	46	57,5%
	Wanita	34	42,5%
pendidikan	SD	-	-
	SLTP	-	-
	SMU	23	28,75%
	D3	19	23,75%

		jumlah	Persentase
	S1	35	43,75%
	Lainnya, D2	3	3,75%
NPWP	Ya	26	32,5%
	Tidak	54	67,5%
Pekerjaan	PNS	32	40%
	Peg. Swasta	46	57,5%
	Profesi	-	-
	Wira usaha	2	2,5%

Tabel hasil penyebaran angket/kuesioner di 8 kelurahan dengan target sampel 80 responden bisa terlihat dengan jelas bahwa perbandingan Jenis kelamin yaitu Pria dan Wanita. Pria lebih mendominasi dengan persentase 57,5% sedangkan wanita 42,5%. Jenjang pendidikan jika dilihat dari responden yang mengisi kuesioner bahwa tingkat pendidikan SD dan SLTP tidak ada responden yang menjawab. Sedangkan tingkat pendidikan SMU menunjukkan bahwa ada 23 reponden yang menjawab atau sekitar 28,75% dari total responden. Diploma dua (D2) dalam kolom lainnya menunjukkan 3 orang responden dengan persentase 3,70%. Tingkat pendidikan Diploma tiga (D3) responden yang menjawab 19 orang dengan persentase 23,75%. Tingkat pendidikan Strata satu (S1) lebih mendominasi yaitu sebanyak 35 responden dengan persentase 43,75%. Dalam kolom pertanyaan NPWP responden yang menjawab **Ya** sebanyak 26 responden atau 32,5% dan yang menjawab **Tidak** sebanyak 54 responden atau 67,5%. Jenis pekerjaan seperti PNS responden yang menjawab 32 orang atau 40%. Pegawai swasta responden yang menjawab 46 orang atau 57,5% dan wira usaha dengan responden 2 orang atau sekitar 2,5%.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansi dibawah 0,005 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Hasil pengujian berdasarkan pertanyaan yang sudah dikeluarkan dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2
Hasil uji Validitas

pertanyaan	sig	Pearson corelation	keterangan
Mtv 001	0,000	0,415	valid
Mtv 003	0,000	0,444	valid
Mtv 004	0,000	0,415	valid

pertanyaan	sig	Pearson correlation	keterangan
Mtv 005	0,000	0,521	valid
Mtv 007	0,000	0,405	valid
Mtv 008	0,000	0,488	valid
Mtv 0010	0,004	0,318	valid
Mtv 0012	0,000	0,576	valid
Mtv 0013	0,000	0,561	valid
Mtv 0018	0,000	0,643	valid
Mtv 0019	0,000	0,495	valid
Mtv 0020	0,000	0,614	valid
Mtv 0021	0,000	0,581	valid
Mtv 0022	0,000	0,592	valid
Mtv 0023	0,000	0,678	valid

4.2.2 Uji Reliabilitas

Pedoman alat pengukur dikatakan *reliabel* adalah jika nilai memberikan nilai *Cronbach Alpha* besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Hasil uji Reliabilitas

Hasil uji Reliabilitas menunjukkan *Cronbach Alpha* sebesar 0,796 dan dinyatakan reliabel karena diatas 0,60.

4.3 Uji Asumsi Model ANOVA

Jika nilai *levене's test* signifikan (dibawah 5%), maka hipotesa nol akan ditolak bahwa grup memiliki varians yang berbeda dan hal ini menyalahi asumsi. Jadi yang dikehendaki adalah tidak dapat menolak hipotesa nol atau hasil *levене's test* tidak signifikan (diatas 5%)

Tabel 4
Uji asumsi Levene's

Dependent Variable: motivasi

F	df1	df2	Sig.
1.191	7	72	.319

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

- a. Design: Intercept+pendidikan+pekerjaan+pendidikan * pekerjaan

Tabel 4 menunjukkan nilai F hitung sebesar 1,191 dan nilai sig (0,319) > α (0.05) yang berarti hipotesa nol diterima. Jadi, varian dari variabel dependen sama untuk semua kelompok dan tidak terjadi penyimpangan terhadap asumsi Anova.

4.4 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis pertama, menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak. Hipotesis kedua, menguji pengaruh jenis pekerjaan wajib pajak terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dan hipotesis ketiga, menguji interaksi tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak.

Tabel 5 berikut menyajikan pengaruh kedua variabel dan pengaruh interaksi.

Tabel 5
Ikhtisar Hasil Regresi

Dependent Variable: motivasi

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	337.631(a)	7	48.233	1.430	.207
Intercept	98283.867	1	98283.867	2914.070	.000
pendidikan	260.637	3	86.879	2.576	.060
pekerjaan	54.105	2	27.053	.802	.452
pendidikan * pekerjaan	47.392	2	23.696	.703	.499
Error	2428.369	72	33.727		
Total	310286.000	80			
Corrected Total	2766.000	79			

a. R Squared = .122 (Adjusted R Squared = .037)

Pada variabel pendidikan (Hipotesis 1), nilai signifikansi menunjukkan angka 0.060. Karena nilai ini di atas nilai 0,05 maka H_{a1} ditolak. Jadi, tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi untuk memenuhi kewajiban pajak. Penelitian sebelumnya (Nurwati, 1995) menunjukkan adanya

hubungan yang kuat antara latar belakang pendidikan wajib pajak dengan motivasi memenuhi kewajiban pajak.

Variabel jenis pekerjaan (Hipotesis 2) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,452. Karena nilai ini diatas 0,05 maka H_{a2} ditolak. Jadi, jenis pekerjaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak.

Hipotesis 3 menguji pengaruh interaksi variabel pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak. Hasil interaksi (lihat pendidikan*pekerjaan) menunjukkan nilai signifikansi 0,499. Karena nilai signifikansi diatas 0,05 maka H_{a3} ditolak. Jadi, interaksi antara variabel pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak.

4.5 Pembahasan atas Hasil Uji Hipotesis:

Hasil analisis diatas menjelaskan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak. Seharusnya, semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak diharapkan mereka semakin termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak. Tetapi, ternyata dalam penelitian ini tingkat pendidikan wajib pajak sama sekali tidak mempengaruhi motivasi untuk melakukan kewajiban perpajakan. Padahal sistem perpajakan di jepang sudah menerapkan pendidikan perpajakan di usia dini bagi warganya dan ini terbukti efektif. Keberhasilan sistem pendidikan pajak di usia dini juga mampu menumbuhkan etika-etika sosial dan nilai-nilai budaya tertanam dalam masyarakat dan mendorong tumbuhnya tanggung jawab kolektif bangsa jepang. Kebersamaan ini menjadi salah satu modal utama pertumbuhan pesat perekonomian jepang yang sekaligus menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya (Berita Pajak 1 maret 2006:35). Sedangkan di Indonesia dengan sistem *self assessment* maka tugas fiskus hanyalah melayani dan mengawasi. Wajib pajak dipercaya menghitung dan menyetor sendiri jumlah pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Ditjen Pajak. Bila SPT yang disampaikan tidak benar atau tidak jujur DJP sulit mendeteksinya karena DJP kekurangan akses, juga karena kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. Maka untuk membentuk masyarakat yang sadar, peduli dan terbuka tentang pajak, diperlukan penyuluhan dan pendidikan pajak sejak dini serta berkesinambungan.

Sistem *Self Assesment* merupakan salah satu bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang kepada negara. Bagi pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan atau swasta kewajiban membayar pajak dipotong langsung oleh pemberi kerja (perusahaan) sehingga banyak yang tidak paham akan mekanisme administrasi perpajakan. Bagi mereka yang mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja maka mereka diharuskan menyampaikan SPTnya sendiri ke KPP dan itu pun berlaku bagi para wirausaha serta profesi (tenaga ahli/ profesional).

Variabel pekerjaan tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak ini bisa saja disebabkan karena kurangnya sosialisasi, penyuluhan dan lain-lain. Penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa apapun jenis pekerjaan atau profesi yang dijalani wajib pajak di kecamatan Jatinegara tidak mempunyai pengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak. Seperti yang penulis ungkapkan diatas bahwa kewajiban pajak mereka telah dipotong langsung oleh perusahaan sehingga mereka tidak terlalu peduli terhadap kewajiban pajak penghasilannya. Padahal sekarang DJP sedang menggalakkan NPWP secara jabatan ini menyebabkan pihak yang tadinya tidak ber-NPWP menjadi ber-NPWP. Pemberian NPWP ini dilaksanakan dengan seleksi yang dilakukan secara komputerisasi berdasarkan pusat data pajak. Konsekuensinya mereka harus melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Diakui bahwa banyak pihak yang tidak senang dengan penetapan ini, namun hal tersebut harus tetap dilakukan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan *tax ratio* serta sebagai salah satu bentuk kepedulian masyarakat untuk bahu-membahu membiayai negara melalui pajak.

Interaksi antara tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan tidak mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh bersama atau *joint effect* antara variabel tingkat pendidikan dan variabel jenis pekerjaan terhadap motivasi dalam memenuhi kewajiban pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak juga tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak. Interaksi keduanya (tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan) juga menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak. *R squared* sebesar 0,122 yang berarti variabilitas motivasi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan interaksi antara variabel tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan adalah sebesar 12,2% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain contohnya mengenai sosialisasi pajak adalah faktor yang paling dominan karena diharapkan wajib pajak mengetahui terlebih dahulu tentang definisi pajak, tujuan pajak dan penggunaan uang pajak untuk pembangunan suatu negara sehingga diharapkan dengan pengetahuan tersebut masyarakat akan muncul kesadaran dan lambat laun akan patuh dan taat membayar pajak.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil pengujian dan analisis terhadap data, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dengan menunjukkan nilai signifikansi diatas 5%.

2. Jenis pekerjaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dengan menunjukkan nilai signifikansi diatas 5%.
3. Interaksi tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dengan menunjukkan hasil nilai signifikansi diatas 5%.

5.2. Implikasi

Tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak dikarenakan kurangnya sosialisasi pajak baik melalui penyuluhan langsung (yang dilakukan oleh aparat pajak) iklan layanan masyarakat baik media cetak atau elektronik. Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak merupakan prioritas utama yang harus dilakukan aparat pajak serta berkoordinasi dengan instansi yang terkait agar lebih komprehensif.

5.3. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Kurang cermat dalam membuat kuesioner. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti dirasakan kurang mencerminkan konsep motivasi. Membuat kuesioner yang baik memang membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang ekstra sehingga bisa meminimalisir butir yang tidak valid.
2. Penelitian hanya terbatas pada lingkup Kecamatan Jatinegara dengan jumlah sampel yang relatif sedikit. Diharapkan penelitian yang akan datang lebih luas lagi lingkup dan sampel yang akan diteliti sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa terus-menerus memperbaiki citra perpajakan Indonesia.

5.4. Rekomendasi

Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa rekomendasi mengenai beberapa hal, diantaranya:

1. Agar lebih banyak penelitian yang lebih mengutamakan masyarakat sebagai responden karena penulis yakin bahwa masyarakat harus lebih memahami dunia penelitian sehingga tumbuh minat masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan peneliti lain sehingga menambah pengetahuan masyarakat dalam hal masalah yang akan diteliti.
2. Memilih obyek penelitian lain dan jangkauan yang lebih luas lagi misalnya tingkat walikotamadya, DKI Jakarta atau provinsi-provinsi lain yang dikehendaki peneliti yang akan datang.
3. Sistem perubahan administrasi pajak modern (e Filling, e SPT, e Reg), juga cukup menarik untuk dijadikan contoh penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Aan Almaidah. *Mengukur mutu pelayanan dari Respons wajib pajak*, Berita Pajak, no 1530/ tahun 37, 1 nov 2005.
- Assifie, Bahasyim. *Analisis kinerja organisasi dengan pendekatan system dynamics*, Berita pajak, no 1522/ tahun 37, I sept 2004.
- Damar, Hario dkk., *Gambaran umum administrasi perpajakan di Jepang*, Berita Pajak, tahun 38, 1 maret 2006.
- Fitriandi, Primandita dkk. *Kompilasi UU Perpajakan Terlengkap*, Salemba Empat, Jakarta, 2004.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Edisi III, Jakarta, 2005.
- Gunadi. *Reformasi adminstrasi perpajakan menuju good governance*, Berita Pajak no 1514 tahun 36, 1 mei 2004.
- Hakim, Rusman. *Dengan wirausaha menepis krisis*, Elex media komputindo, Jakarta, 1998.
- Hasan, M Tholhah. *Islam dan Masalah SDM*, Lantabora Press, Jakarta, 2005.
- Hutagaol, John. *Sekilas tentang Badan Hukum Pendidikan dan Aspek Perpajakannya*, Berita Pajak no 1535/tahun 37, 15 maret 2005.
- Hamid, Abdul. *Panduan Penulisan Skripsi*, FEIS UIN Press, Jakarta, 2004.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2004.
- Indriyanto, Kuwat. *Masyarakat Berbasis pengetahuan*, Berita Pajak tahun 38, 15 maret 2006.
- Indonesian Tax Review. *Di balik sepuluh juta NPWP*, volume 4 edisi 50/2005.
- Mustofa, Arif. *Profesional Skepticism dalam Pemeriksaan Pajak*, Berita Pajak no 1514/ tahun 36, 1 mei 2004.
- Nasution, S. *Sosiologi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Nurwati, Siti. *Analisis Hubungan latar belakang pendidikan wajib pajak dengan motivasi memenuhi kewajiban pajak Di Kec. Matraman*. Univ. Negeri Jakarta, 1995.
- Pandiangan, Liberty. *Penyakit Pajak Bernama Psychotax*, Berita Pajak, no 1517 tahun 36/ 15 juni 2004.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- Ridwan, Mohammad. *Arti Pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan Perpajakan kepada wajib pajak*, Berita Pajak no 1530 tahun 37/15 nov 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 2004.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Rosda, Bandung, 1997.

- Subri, Mulyadi. *Ekonomi SDM dalam perspektif Pembangunan*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2003.
- Trihendradi, Cornelius. *Memecahkan kasus statistic: Deskriptif, parametric, dan non-parametric dengan SPSS 12.0*, Penerbit Andi Yogyakarta, 2004.
- Tambunan, Friez. *Pajak sosial Pendidikan, Mengapa Tidak?*, Berita Pajak no 1522, tahun 37/ 1 sept 2004.
- Tambunan, Tulus TH. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2002.
- , . *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Winardi, Wahyu. *Manajemen komunikasi Internal dalam mewujudkan efisiensi kerja*, Berita Pajak, tahun 38, 15 maret 2006.
- Winardi. *Motivasi dan Pemasalahan dalam Manajemen*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.